



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160.181/488/2023 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:


- a. dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2023;
- b. landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Purworejo;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
 - k. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
 - o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo;
 - q. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
 - r. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
 - s. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - t. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo;
 - v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
 - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
 - x. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
 - y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
 - z. Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
 - aa. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
 - bb. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

cc. Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
dd. Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
ee. Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
ff. Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
gg. Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
hh. Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
ii. Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
jj. Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
kk. Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
ll. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
mm. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
nn. Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo; dan
oo. Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21-08-2023

✓ BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 160.18/488/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). UU Nomor 25 tahun 2004 pada pasal 7 juga menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun tersebut apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan Kondisi tersebut meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 telah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023. Seiring dengan pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II ternyata terdapat berbagai perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan yang mempengaruhi tercapainya target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat pada tahun 2023. Atas dasar hal tersebut maka Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 untuk menyesuaikan kembali perencanaan yang sudah berjalan dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga target sasara kinerja tahun 2023 dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 82 Seri D Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 48 Seri E Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 29);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perkembangan yang terjadi pada saat ini yang mempengaruhi perencanaan sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tersebut agar dapat mengakomodir perkembangan pada saat ini sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

- b. Mengevaluasi Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan triwulan II;
- c. Memenuhi ketentuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja memperhatikan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Pada Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan 3 program, 12 kegiatan. dan 54 Sub kegiatan. Adapun capaian target dan realisasi kinerja program Inspektorat sampai dengan triwulan II, adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pogram/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, secara umum kegiatan dapat memenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan, karena telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran dan target kinerja menyesuaikan kebutuhan dan perubahan jadwal kinerja.

Adapun program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II antara lain:

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Hal ini dikarenakan untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terdapat perubahan jadwal pengadaan karena ada perubahan metode pengadaan menjadi E purchasing dan terdapat jenis barang yang tidak jadi dilakukan pengadaan.

- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hal ini dikarenakan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum direalisasikan optimal menyesuaikan kondisi kendaraan operasional masih baik dan layak (pengadaan tahun 2022).

- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;

Hal ini dikarenakan untuk subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di terdapat keterlambatan jadwal penyusunan perubahan PKPT Tahun 2023

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, pencapaian target keluaran kegiatan telah terpenuhi semua selain 3 kegiatan diatas yang tidak tercapai target kinerjanya. Pada Triwulan II ini terdapat sub kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan yaitu Reviu Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II, program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat jika dilihat dalam laporan evaluasi renja dan terdapat subkegiatan yang realisasinya melampaui target yang direncanakan yaitu : sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang telah melaksanakan bimtek untuk 68 orang, subkegiatan Pengawasan Desa yang telah menyelesaikan 64 Laporan Hasil Pengawasan Desa, subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah menyelesaikan 65 laporan hasil PDTT, dan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang telah melaksanakan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi pada 105 Perangkat daerah.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Inspektorat berkaitan erat dengan tugas pokok yang dimiliki Inspektorat melalui fungsinya sebagai

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi. Selain itu juga terkait dengan pendukung pelaksanaan fungsi Inspektorat baik sarana prasarana, peningkatan kapabilitas APIP maupun administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan diantaranya:

- Koordinasi pembahasan perumusan kebijakan Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan menyesuaikan dengan kesiapan dari bagian hukum waktu yang mengakibatkan penyelesaian penyusunan rekomendasi peraturan/pedoman terlambat;
- Keterlambatan jadwal pengadaan barang jasa yang dibutuhkan oleh Inspektorat dan adanya perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tidak tepat waktu yang mengakibatkan penyelesaian laporan hasil pengawasan juga terlambat;
- Adanya mandatori penugasan diluar PKPT yang harus dilaksanakan mengakibatkan target pengawasan di PKPT menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan secara umum yaitu :

- Pelaksanaan subkegiatan sesuai Rencana Kerja Operasional (RKO) yang disusun dan anggaran kas yang direncanakan.
- Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin/berkala untuk memastikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang direncanakan dan dapat segera melakukan penyesuaian target kinerja apabila ada perubahan kebijakan.
- pengawasan internal telah direncanakan dalam dokumen PKPT yang didalamnya telah mempertimbangkan mandatori pengawasan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.

- Beberapa mandatory penugasan baru diperintahkan pada awal tahun dan harus dilaksanakan dengan terbatas waktu dalam penyelesaiannya sehingga dalam penugasan diprioritaskan dalam pelaksanaannya ataupun dengan penugasan tumpang/bersamaan waktunya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
- Menambah beban target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya untuk mencapai target program/kegiatan dalam Renstra yang ditetapkan apabila target capaian program/kegiatan tidak terpenuhi.
 - Tidak terlaksananya target program/kegiatan maupun mundurnya waktu pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra apabila target capaian program/kegiatan tidak terpenuhi.
 - Realisasi anggaran tidak terealisasi secara maksimal apabila target capaian program/kegiatan tidak optimal.
 - Kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dan dilakukan yaitu :
- Penjadwalan ulang kegiatan yang belum dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dalam untuk memaksimalkan capaian output kegiatan.
 - Perubahan desain kegiatan yang belum mencapai output kegiatan sesuai kondisi anggaran dan kebutuhan untuk percepatan pencapaian target.
 - Perubahan anggaran menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan untuk kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya melalui rekomposisi maupun pergeseran anggaran untuk mendukung capaian output kegiatan.
 - Perubahan target capaian program, hasil kegiatan dan keluaran sub kegiatan sesuai kondisi dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.

- Sinkronisasi Perubahan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 yang sudah mengakomodasi mandatory penugasan yang belum masuk dalam rencana penugasan dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo s/d Triwulan II Tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo
Periode Pelaksanaan: Januari s/d Juni Tahun 2023

Ir dikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD yaitu : Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | | | (7) | | | (8) | | (9) | | (12 = 8+9) | | | (13=13/7*100%) | | | (14=12/5 x100%) | | | (15) | (16) |
|-----|---|---|--|-----|---------|------------|-------|---------|------------|------|---------|-----------|------|---------|-------|----------|------------|---------|------------|----------------|---------|-----|-----------------|---------|-----|-------------|------|
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | | |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84 | % | | 83,02 | % | | 82,7 | % | | 0 | | 83,55 | | 83,55 | % | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84 | % | | 83,02 | % | | 82,7 | % | | 0 | | 83,55 | | 83,55 | % | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 | % | 6,2548E+10 | 100 | % | 1,2837E+10 | 100 | % | 1,177E+10 | 21,3 | 2,4E+09 | 33,02 | 3,78E+09 | 54,32 | % | 6218477549 | 54% | % | 53% | 31% | % | 30% | Inspektoret | APBD |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35 | Dokumen | 517206474 | 7 | Dokumen | 70473700 | 7 | Dokumen | 95129600 | 2 | 2,1E+07 | 1 | 9143500 | 3 | Dokumen | 30532600 | 43% | Dokumen | 32% | 29% | Dokumen | 20% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 77 | Dokumen | 250111755 | 15 | Dokumen | 34910400 | 15 | Dokumen | 45170600 | 6 | 1,2E+07 | 0 | 945600 | 6 | Dokumen | 13369600 | 40% | Dokumen | 30% | 27% | Dokumen | 19% | Inspektoret | APBD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dokumen | 66210474,2 | 1 | Dokumen | 3086350 | 1 | Dokumen | 13706200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0% | Dokumen | 0% | 20% | Dokumen | 5% | Inspektoret | APBD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dokumen | 14258806 | 1 | Dokumen | 2346550 | 1 | Dokumen | 2566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0% | Dokumen | 0% | 20% | Dokumen | 16% | Inspektoret | APBD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD | Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD | 5 | Dokumen | 21135225,8 | 1 | Dokumen | 2596350 | 1 | Dokumen | 3993800 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | Dokumen | 1170000 | 0% | Dokumen | 29% | 20% | Dokumen | 18% | Inspektoret | APBD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dokumen | 16231231 | 1 | Dokumen | 2346550 | 1 | Dokumen | 2991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0% | Dokumen | 0% | 20% | Dokumen | 14% | Inspektoret | APBD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 80 | Laporan | 21829385 | 16 | Laporan | 3330500 | 16 | Laporan | 3985000 | 3 | 0 | 4 | 2954000 | 7 | Laporan | 2954000 | 44% | Laporan | 74% | 29% | Laporan | 29% | Inspektoret | APBD |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35 | Laporan | 127429597 | 6 | Laporan | 21857000 | 7 | Laporan | 22717000 | 3 | 7795100 | 0 | 5243900 | 3 | Laporan | 13039000 | 43% | Laporan | 57% | 26% | Laporan | 27% | Inspektoret | APBD |

| No | Tujuan / Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir) | | | Realisasi Capaian Kine ja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renje OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) | | | Unit OPD Penanggung Jawab | Sumber Dana (APBD, DAK, TP,lainnya) |
|-----|------------------|--|--|---|---------|------------|---|---------|------------|---|-----------|-----------|---------------------------------|---------|-------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|---|-----------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | | | (7) | | | (8) | | (9) | | (12 = 8+9) | | | (13= 12/7*100%) | | | (14= 12/5 x100%) | | | (15) | (16) |
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | % | 1358595406 | 100 | % | 321335274 | 100 | % | 360358200 | 63,63 | 9,3E+07 | 63,63 | 85882614 | 72,72 | % | 179198916 | 72,72 | % | 50% | 35% | % | 26% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ~Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | Paket | 83067984,1 | 1 | Paket | 6898000 | 2 | Paket | 14720100 | 1 | 7356200 | 0 | 0 | 1 | Paket | 7356200 | 50% | Paket | 50% | 20% | Paket | 17% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ~Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 17075310,4 | 1 | Paket | 1725000 | 1 | Paket | 3294400 | 0 | 0 | 0 | 1245800 | 0 | Paket | 1245800 | 0% | Paket | 38% | 20% | Paket | 17% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | ~Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 | Paket | 99246643,6 | 1 | Paket | 12183127 | 2 | Paket | 18499600 | 0 | 9110202 | 1 | 0 | 1 | Paket | 9110202 | 50% | Paket | 49% | 20% | Paket | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ~Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 55 | Paket | 80969274 | 12 | Paket | 65778600 | 12 | Paket | 67914000 | 3 | 1,7E+07 | 3 | 15409000 | 6 | Paket | 31923500 | 50% | Paket | 47% | 33% | Paket | 26% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ~Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 297329060 | 12 | Paket | 35018350 | 12 | Paket | 56660000 | 3 | 2E+07 | 3 | 7649800 | 6 | Paket | 27896300 | 50% | Paket | 49% | 30% | Paket | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ~Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 | Dokumen | 15772236 | 2 | Dokumen | 2796000 | 2 | Dokumen | 2796000 | 2 | 580000 | 0 | 870000 | 2 | Dokumen | 1450000 | 100% | Dokumen | 52% | 40% | Dokumen | 27% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Bahan/Material | ~Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 | Paket | 103714080 | 1 | Paket | 11325000 | 1 | Paket | 19880000 | 1 | 1,4E+07 | 0 | 5985400 | 1 | Paket | 19879600 | 100% | Paket | 100% | 40% | Paket | 30% | Inspektoret | APBD |
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | ~Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 60 | Laporan | 37831900 | 12 | Laporan | 14034500 | 12 | Laporan | 15900000 | 3 | 551000 | 3 | 1477000 | 6 | Laporan | 2028000 | 50% | Laporan | 13% | 30% | Laporan | 18% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ~Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Laporan | 745143169 | 12 | Laporan | 150320297 | 12 | Laporan | 137616800 | 3 | 2,4E+07 | 3 | 43993364 | 6 | Laporan | 67586364 | 50% | Laporan | 49% | 30% | Laporan | 29% | Inspektoret | APBD |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ~Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20 | Dokumen | 107009949 | 4 | Dokumen | 17461400 | 4 | Dokumen | 19277300 | 0 | 1137700 | 1 | 7446650 | 1 | Dokumen | 8584350 | 25% | Dokumen | 45% | 25% | Dokumen | 24% | Inspektoret | APBD |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ~Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10 | Dokumen | 21435800 | 2 | Dokumen | 3795000 | 2 | 2 Dokumen | 3800000 | 0 | 333000 | 0 | 1805600 | 0 | 2 Dokumen | 2138600 | 0% | 2 Dokumen | 56% | 20% | 2 Dokumen | 28% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan | 20 | Jenis | 2377850717 | 4 | Jenis | 1844736484 | 2 | Jenis | 384844800 | 0 | 0 | 2 | 1,94E+08 | 2 | Jenis | 194470000 | 100% | Jenis | 51% | 30% | Jenis | 86% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 | unit | 0 | 1 | unit | 418000000 | 0 | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | 0 | 0% | unit | 0% | 100% | unit | 100% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | unit | 0 | 3 | unit | 919500000 | 0 | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unit | 0 | 0% | unit | 0% | 100% | unit | 100% | Inspektoret | APBD |

| No | Tujuan / Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) | | | Unit OPD Penanggung Jawab | Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya) |
|----|---|---|---|---|---------|------------|---|---------|-----------|---|---------|-------------|---------------------------------|---------|----|----------|--|---------|-----------|--|------------|-----|---|----------------|-----|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | | | (7) | | | (8) | | (9) | | (12 = 8+9) | | | (13=12/7*100%) | | | |
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ~Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 144 | unit | 2311995329 | 65 | unit | 347742137 | 75 | Unit | 340880700 | 0 | 0 | 16 | 1,59E+08 | 16 | Unit | 158770000 | 21% | Unit | 47% | 56% | Jnit | 25% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ~Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 11 | unit | 365855388 | 3 | unit | 159494347 | 6 | Unit | 43964100 | 0 | 0 | 4 | 35700000 | 4 | Unit | 35700000 | 67% | Unit | 81% | 64% | Jnit | 53% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15 | Laporan | 332159182 | 3 | Laporan | 124727053 | 3 | Laporan | 166546400 | 3 | 3,7E+07 | 3 | 34387055 | 3 | Laporan | 71361018 | 100% | Laporan | 43% | 40% | Laporan | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ~Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 | Laporan | 3616650 | 12 | Laporan | 127000 | 12 | Laporan | 650000 | 3 | 174000 | 3 | 38500 | 6 | Laporan | 212500 | 50% | Laporan | 33% | 30% | Laporan | 9% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ~Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Laporan | 586305000 | 12 | Laporan | 77414049 | 12 | Laporan | 105.000.000 | 3 | 2,4E+07 | 3 | 22031623 | 6 | Laporan | 46514654 | 50% | Laporan | 44% | 30% | Laporan | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ~Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | Laporan | 342237532 | 12 | Laporan | 47186004 | 12 | Laporan | 60896400 | 3 | 1,2E+07 | 3 | 12316932 | 6 | Laporan | 24633864 | 50% | Laporan | 40% | 30% | Laporan | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30 | Jenis | 3147541110 | 6 | Jenis | 449755244 | 6 | Jenis | 571450250 | 4 | 1E+08 | 2 | 2,34E+08 | 6 | Jenis | 338712215 | 100% | Jenis | 59% | 33% | Jenis | 25% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ~Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | Unit | 58829989 | 1 | Unit | 10397049 | 1 | Unit | 10429000 | 1 | 2803315 | 0 | 2918000 | 1 | Unit | 5721315 | 100% | Unit | 55% | 40% | Jnit | 27% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ~Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Fajak dan Perizinannya | 50 | Unit | 383450602 | 10 | Unit | 42234500 | 10 | Unit | 73522000 | 7 | 9610700 | 0 | 3834000 | 7 | Unit | 13444700 | 70% | Unit | 18% | 34% | Jnit | 15% | Inspektoret | APBD |
| | | Pemeliharaan Mebel | ~Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1000 | Unit | 113948200 | 20 | Unit | 2100000 | 200 | Unit | 20200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | 0 | 0% | Unit | 0% | 2% | Jnit | 2% | Inspektoret | APBD |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ~Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 542 | Unit | 364107620 | 74 | Unit | 43503000 | 117 | Unit | 67820000 | 7 | 1,2E+07 | 53 | 10357000 | 60 | Unit | 22738700 | 51% | Unit | 34% | 25% | Jnit | 18% | Inspektoret | APBD |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ~Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 2110972955 | 1 | Unit | 337334695 | 1 | Unit | 377495250 | 0 | 7E+07 | 1 | 2,17E+08 | 1 | Unit | 286327500 | 100% | Unit | 76% | 40% | Jnit | 30% | Inspektoret | APBD |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ~Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 112 | Unit | 116231744 | 24 | Unit | 14186000 | 22 | Unit | 21984000 | 10 | 9730000 | 12 | 750000 | 22 | Unit | 10480000 | 100% | Unit | 48% | 41% | Jnit | 21% | Inspektoret | APBD |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas | | Nilai Area Pengawasan Penguatan | 2,93 | skor | | 2,35 | skor | | 2,88 | skor | | 0 | | 0 | | 0 | skor | | | | | | | | | |

0

| No | Tujuan / Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir) | | | Realisasi Capaian Kine ja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) | | | Unit OPD Penanggung Jawab | Sumber Dena (APBD, DAK,TP,lainnya) |
|-----|---|---|---|---|-------------|------------|---|-------------|------------|---|-------------|-----------|---------------------------------|---------|-------|----------|--|-------------|-----------|--|-------------|-----|---|-------------|-----|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | | | (7) | | | (8) | | (9) | | (12 = 8+9) | | | (13=12/7*100%) | | | (14=12/5 x100%) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP | | Tingkat Matunitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Elemen minimal Level 3 | 3,19 | level | | 3,014 | level | | 3,1 | level | | 0 | | 0 | | 0 | level | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 | % | 9356971026 | 100 | % | 1420030243 | 100 | % | 1,754E+09 | 22,06 | 3,5E+08 | 20,42 | 3,42E+08 | 42% | % | 692980705 | 42,48% | % | 40% | 20% | % | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100 | % | 1310777794 | 100 | % | 277253965 | 100 | % | 298834000 | 22,08 | 5,6E+07 | 21,31 | 53650600 | 43% | % | 109336800 | 43,39% | % | 37% | 20% | % | 24% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | 35 | Dokumen | 9356971026 | 7 | Dokumen | 1420030243 | 7 | Dokumen | 1,754E+09 | 5 | 3,5E+08 | 2 | 3,42E+08 | 5 | Dokumen | 692980705 | 42,48% | Dokumen | 40% | 34% | Dokumen | 21% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | ~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 432 | Laporan | 1330533011 | 111 | Laporan | 264828350 | 85 | Laporan | 323571000 | 28 | 2,8E+07 | 14 | 16264800 | 42 | Laporan | 44610500 | 49% | Laporan | 14% | 35% | Laporan | 17% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | ~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 479 | Laporan | 1127458373 | 178 | Laporan | 184354300 | 91 | Laporan | 203741300 | 20 | 2,5E+07 | 15 | 8897100 | 35 | Laporan | 34206750 | 38% | Laporan | 17% | 44% | Laporan | 19% | Inspektoret | APBD |
| | | Reviu Laporan Kinerja | ~Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 9 | Laporan | 205122457 | 1 | Laporan | 4434600 | 2 | Laporan | 37561400 | 2 | 3,5E+07 | 0 | -462100 | 2 | Laporan | 34871700 | 100% | Laporan | 93% | 33% | Laporan | 19% | Inspektoret | APBD |
| | | Reviu Laporan Keuangan | ~Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 150 | Laporan | 690616723 | 30 | Laporan | 92870800 | 30 | Laporan | 124187400 | 30 | 9,5E+07 | 0 | 5549500 | 30 | Laporan | 100965400 | 100% | Laporan | 81% | 40% | Laporan | 28% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengawasan Desa | ~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 180 | Laporan | 1113947288 | 63 | Laporan | 138094132 | 36 | Laporan | 199404400 | 33 | 4,6E+07 | 31 | 57481033 | 64 | Laporan | 103415516 | 178% | Laporan | 52% | 71% | Laporan | 22% | Inspektoret | APBD |
| | | Kerja Sama Pengawasan Internal | ~Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 6 | Kesepakatan | 295003463 | 2 | Kesepakatan | 43883843 | 2 | Kesepakatan | 53846900 | 0 | 9507139 | 0 | 2502300 | 0 | Kesepakatan | 12009439 | 0% | Kesepakatan | 22% | 33% | Kesepakatan | 19% | Inspektoret | APBD |
| | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | ~Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 30 | Dokumen | 4594289710 | 278 | Dokumen | 691564218 | 6 | Dokumen | 811310000 | 0 | 1,1E+08 | 0 | 2,52E+08 | 0 | Dokumen | 362901400 | 0% | Dokumen | 45% | 927% | Dokumen | 23% | Inspektoret | APBD |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 10 | Laporan | 1310777794 | 2 | Laporan | 277253965 | 2 | Laporan | 298834000 | 2 | 5,6E+07 | 1 | 53650600 | 2 | Laporan | 109336800 | 43,39% | Laporan | 37% | 40% | Laporan | 24% | Inspektoret | APBD |
| | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | ~Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 50 | Laporan | 606743178 | 15 | Laporan | 75630815 | 10 | Laporan | 111858000 | 2 | 1,1E+07 | 0 | 5484900 | 2 | Laporan | 16705400 | 20% | Laporan | 15% | 34% | Laporan | 15% | Inspektoret | APBD |
| | | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | ~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 112 | Laporan | 1304034616 | 117 | Laporan | 201623150 | 24 | Laporan | 186976000 | 29 | 4,4E+07 | 36 | 48165700 | 65 | Laporan | 92631400 | 271% | Laporan | 50% | 163% | Laporan | 29% | Inspektoret | APBD |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan | 100 | % | 1436387835 | 100 | % | 726326476 | 100 | % | 145113700 | 3,81 | 5232500 | 3,14 | 4869200 | 6,95 | % | 10101700 | 6,95% | % | 7% | 21% | % | 51% | Inspektoret | APBD |
| | | | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | 100 | % | 8330956376 | 100 | % | 589596721 | 100 | % | 1,631E+09 | 13,74 | 1,9E+08 | 23,21 | 3,95E+08 | 36,95 | % | 586517715 | 36,95% | % | 36% | 27% | % | 15% | Inspektoret | APBD |

0

| No | Tujuan / Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir) | | | Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) | | | Unit OPD Penanggung Jawab | Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya) |
|----|------------------|---|---|--|------------------|------------|--|------------------|-----------|---|------------------|-------------|---------------------------------|---------|-----|----------|--|------------------|-----------|--|------------------|-----|---|------------------|-----|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | | | (7) | | | (8) | | (9) | | (12 = 8+9) | | | (13=12/7*100%) | | | |
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | K | Satuan | Rp | | |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 10 | Dokumen | 1436387835 | 2 | Dokumen | 726326476 | 2 | Dokumen | 145113700 | 0 | 5232500 | 0 | 4869200 | 1 | Dokumen | 10101700 | 6,95% | Dokumen | 7% | 30% | Dokumen | 51% | Inspektoret | APBD |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 19 | Rekomendasi | 565877134 | 3 | Rekomendasi | 53275200 | 3 | Rekomendasi | 103741000 | 0 | 2706400 | 0 | 1300600 | 0 | Rekomendasi | 4007000 | 0% | Rekomendasi | 4% | 16% | Rekomendasi | 10% | Inspektoret | APBD |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 9 | Rekomendasi | 870510701 | 2 | Rekomendasi | 373051276 | 1 | Rekomendasi | 41372700 | 0 | 2526100 | 1 | 3568600 | 1 | Rekomendasi | 6094700 | 100% | Rekomendasi | 15% | 33% | Rekomendasi | 78% | Inspektoret | APBD |
| | | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | 20 | Laporan | 8330956376 | 4 | Laporan | 589596721 | 4 | Laporan | 1,631E+09 | 3 | 1,9E+08 | 2 | 3,95E+08 | 3 | Laporan | 586517715 | 37% | Laporan | 36% | 35% | Laporan | 15% | Inspektoret | APBD |
| | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 30 | Perangkat Daerah | 211714844 | 6 | Perangkat Daerah | 10618400 | 6 | Perangkat Daerah | 39084000 | 0 | 1968000 | 0 | 1101000 | 0 | Perangkat Daerah | 3069000 | 0% | Perangkat Daerah | 8% | 20% | Perangkat Daerah | 6% | Inspektoret | APBD |
| | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 393 | Perangkat Daerah | 1393118751 | 79 | Perangkat Daerah | 37203581 | 82 | Perangkat Daerah | 410.999.300 | 7 | 1,3E+07 | 98 | 1,83E+08 | 105 | Perangkat Daerah | 195713582 | 128% | Perangkat Daerah | 48% | 47% | Perangkat Daerah | 12% | Inspektoret | APBD |
| | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 15 | Kegiatan | 4415187521 | 6 | Kegiatan | 479344270 | 2 | Kegiatan | 888.065.400 | 2 | 1,5E+08 | 0 | 1,69E+08 | 2 | Kegiatan | 322595800 | 100% | Kegiatan | 36% | 53% | Kegiatan | 18% | Inspektoret | APBD |
| | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 667 | Perangkat Daerah | 1410935260 | 54 | Perangkat Daerah | 62430470 | 165 | Perangkat Daerah | 292.604.700 | 0 | 2,3E+07 | 103 | 41829800 | 103 | Perangkat Daerah | 65139333 | 62% | Perangkat Daerah | 22% | 24% | Perangkat Daerah | 9% | Inspektoret | APBD |

8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Insektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
9. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Inspektorat Kabupaten Purworejo telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada tugas pokok yang dimiliki, adapun tujuan yang ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Birokrasi yang Bersih melalui Pengawasan Internal yang Berkualitas”** dan **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dari tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja yang telah sesuai kaidah penentuan indikator yang jelas,

terukur, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat akan dicapai melalui 2 (dua) program yang berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat dan 1 (satu) program penunjang, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan internal;
Sampai dengan triwulan II target 42,17%, telah terealisasi kinerja kegiatan pengawasan internal sebesar 42,48 %.
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
Sampai dengan triwulan II target 39%, telah terealisasi kinerja kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 43,39 %.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan indikator :
 - Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
Sampai dengan triwulan II target 7,28%, telah terealisasi kinerja perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sebesar 6,95 %.
 - Persentase hasil pendampingan dan asistensi
Sampai dengan triwulan II target 35,79%, telah terealisasi kinerja kegiatan pendampingan dan asistensi sebesar 36,95%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sampai dengan triwulan II target 49,65%, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 54,32%.

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian realisasi target kinerja Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2023. Permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
sampai dengan Triwulan II

| No | Program/ Kegiatan | Permasalahan |
|----------|---|---|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Adanya mandatory penugasan yang terbatas waktu dan prioritas akan tetapi belum masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berakibat mundurnya jadwal penugasan lain yang sudah tersusun. Selain itu juga terdapat perubahan desan penugasan evaluasi SAKIP menjadi pendampingan dan perubahan obyek pemeriksaan kinerja sesuai Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko hasil konsultasi dengan BPKP |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Adanya mandatory pengawasan tujuan tertentu yang belum masuk didalam PKPT murni dan harus dilaksanakan, kegiatan audit investigasi dan PKKN dilaksanakan berdasar permohonan Masyarakat dan permintaan APH yang masuk. |
| 2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Pembahasan perumusan kebijakan menyesuaikan dengan jadwal kesiapan personel dari bagian Bagian Hukum Setda. |
| | Pendampingan dan Asistensi | Adanya perubahan pedoman pendampingan dan penilaian RB menjadi RB Tematik, perubahan desain subkegiatan SPIP, serta adanya penundaaan pemberian honor kepada tim saber menunggu hasil konsultasi ke pusat. |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Menyesuaikan agenda penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang diedarkan oleh pemerintah daerah. |

| No | Program/ Kegiatan | Permasalahan |
|----|---|---|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terdapat kenaikan tunjangan kinerja fungsional (auditor dan P2UPD) dan penambahan gaji dan tunjangan pegawai, akibat kenaikan pangkat beberapa pegawai dan adanya penambahan pegawai baru pada akhir tahun yang belum teranggarkan. |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Beberapa rencana diklat yang akan diikuti oleh pegawai inspektorat dibatalkan oleh penyelenggara karena sesuatu hal dan adanya perubahan jumlah pegawai yang direncanakan mengikuti diklat/bintek. |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terdapat keterlambatan proses pengadaan barang jasa untuk pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga perubahan |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Adanya rasionalisasi dan efisiensi pengadaan barang jasa untuk pengadaan printer dan scanner dan pengadaan mebel sesuai kebutuhan. |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terdapat kenaikan tarif dasar listrik dan air minum sampai dengan bulan Desember |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan servis dan perbaikan berdasar kondisi Barang milik daerah yang kan dipelihara. Beberapa BMD kondisinya masih baru dan baik sehingga hanya memerlukan pemeliharaan ringan. |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai

kebijakan Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Inspektorat merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya hal yang kritis terkait pelayanan Inspektorat adalah mempertahankan kinerja yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu **“Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Elemen minimal Level 3”** dengan target yang ditetapkan. Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun Inspektorat Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja lainnya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan yaitu “Kapabilitas APIP minimal level 3 pada seluruh elemen”. Mengapa kapabilitas APIP, hal ini karena kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran Inspektorat secara efektif.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Keterbatasan jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan, pendampingan dan asistensi.
2. Belum meratanya standar kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pemeriksaan;
3. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal di lingkungan pemerintah daerah.
4. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal;

5. Belum optimalnya fungsi *consulting* Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/ Kota
6. Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Kabupaten/ Kota
7. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama

Dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo tentunya akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah apabila tidak diatasi secara cepat dan tepat. Pencapaian Target Misi ke 4 yaitu Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menjadi tidak optimal, dimana salah satu indikator sasaran yang harus dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai pelaksana unsur pengawasan mempunyai fungsi dan bertanggung jawab atas capaian nilai Maturitas SPIP minimal level 3 dengan target pada tahun 2023 sebesar 3,1 dan mencapai nilai 3,19 pada tahun 2026.

Secara umum terdapat beberapa peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purworejo , yaitu:

1. Penguatan Peran Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Dukungan penganggaran dari pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
5. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
6. Penguatan Sarana prasarana pendukung kinerja pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas fungsional pengawasan (Auditor dan PPUPD) dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Optimalisasi koordinasi fungsi pembinaan, pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
4. Penerapan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko belum maksimal dilaksanakan oleh perangkat daerah.
5. Meningkatnya partisipasi pengawasan masyarakat dan tuntutan pelayanan publik atas pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan.
6. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penerapan Kendali Mutu Pengawasan sesuai pedoman yang berlaku.
7. Pembangunan Budaya Integritas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 berpedoman pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan internal (target 100%);
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu (target 100%)
 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan indikator :
 - Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (target 100%).
 - Persentase hasil pendampingan dan asistensi (target 100%).
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (target 100%)
- 3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan didalam rencana kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo didasarkan pada pencapaian visi misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adapun Inspektorat Kabupaten Purworejo mendukung misi 4 yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

3.1.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Inspektorat Kegiatan/Sub Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Pengawasan Desa;
 - Kerjasama Pengawasan Internal;
 - Monitoring dan Eavaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- c. Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - Perumusan Kabijakan Tehnis di Bidang Pengawasan;
 - Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
- d. Pendampingan dan Asistensi;
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- g. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Mebel;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

3.1.3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pengarusutamaan Gender.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo, terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang mendukung pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yaitu : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan. Pengawasan Desa, Kerja Sama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Dukungan pengarusutamaan gender dapat dilihat pada setiap penyusunan komposisi tim yang ditugaskan dalam setiap pengawasan yang melibatkan semua unsur fungsional pengawasan yang ada tanpa ada perbedaan sesuai kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing. Susunan tim secara umum dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Penanggungjawab Tim;

Adalah Inspektur Pembantu (Irban), kondisi saat ini terdiri dari 5 (lima) Irban dengan jenis kelamin 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki.

2. Pengendali Teknis (DALNIS)

Adalah Pejabat Fungsional Auditor Madya/Pejabat Fungsional P2UPD Ahli Madya, kondisi saat ini terdiri dari 2 (dua) dalnis berjenis kelamin perempuan dan 3 (tiga) dalnis berjenis kelamin laki-laki.

3. Ketua Tim

Dari 12 (duabelas) tim pemeriksa dari 5 (lima) Irban tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan dalam penunjukan ketua Tim.

4. Anggota Tim

Dari 12 (duabelas) tim pemeriksa hampir rata-rata terdiri dari 2 (dua) anggota tim yang dijabat oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berjenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Kedudukan dalam tim yang melaksanakan tugas pengawasan didasarkan atas surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Inspektur, sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing yang dijabarkan dalam program kerja pengawasan dan anggaran waktu, serta dilengkapi dengan pakta integritas yang ditandatangani masing-masing anggota tim.

3.1.4. Program/Kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan targetnya tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan Triwulan II sesuai perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan perkiraan awal serta keperluan mendesak lainnya mengakibatkan perlu dilakukannya penyesuaian pagu anggaran, penghapusan kegiatan/ sub kegiatan, penyesuaian indikator dan target. Adapun Penjelasan program/ kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan target dapat dilihat dalam tabel 3.1. sedangkan untuk perubahan perubahan program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Hasil Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Purworejo

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|--|--|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100% | 100% | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | -Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | -Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 15 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | -Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | -Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | -Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | -Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | a |

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|---|---|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | -Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | -Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | -Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | -Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | -Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | -Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan | 16 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 2 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100% | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 Orang/bulan | 68 Orang/bulan | a |

8

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|---|---|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | -Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | -Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 Laporan | 6 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | -Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | -Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 26 Laporan | 26 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | -Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | -Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | -Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | -Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | a |

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|--|--|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | -Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | -Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | -Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | -Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 64 Orang | 68 Orang | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | -Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | -Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 64 Orang | 68 Orang | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | -Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | -Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 64 Orang | 50 Orang | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | a |

0

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|--|--|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | -Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | -Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | -Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | -Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | -Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | -Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | -Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | -Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | a |

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|--|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | -Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | -Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | -Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | -Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan | Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan | 2 Jenis | 2 Jenis | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 75 Unit | 16 Unit | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 8 Unit | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | a |

8

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|---|---|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Jenis | 5 Jenis | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | -Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | -Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 11 Unit | a |

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|--|--|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | -Jumlah Mebel yang Dipelihara | -Jumlah Mebel yang Dipelihara | 200 Unit | 0 Unit | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 117 Unit | 83 Unit | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | a |
| 6 | 01 | 01 | 2 | 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | -Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 22 Unit | 27 Unit | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | 100 % | a |
| | | | | | | | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100 % | 100 % | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | 7 Dokumen | 7 Dokumen | a |

7

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|---|---|---|---|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 85 Laporan | 162 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 91 Laporan | 115 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 2 Laporan | 2 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 30 Laporan | 32 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 05 | Pengawasan Desa | Pengawasan Desa | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 36 Laporan | 87 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Kerja Sama Pengawasan Internal | -Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | -Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | 2 Kesepakatan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 6 Dokumen | 6 Dokumen | a |

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|---|---|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 2 Laporan | 2 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | -Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | -Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 10 Laporan | 3 Laporan | a |
| 6 | 01 | 02 | 2 | 02 | 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 24 Laporan | 94 Laporan | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan | 100 % | 100 % | a |
| | | | | | | | | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | 100 % | 100 % | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 3 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | a |

| Kode | | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Jenis Keg. |
|------|----|----|---|----|----|---|---|--|--|--|----------------------|------------|
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | a/b/c |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | 4 Laporan | 4 Laporan | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Perangkat Daerah | 6 Perangkat Daerah | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 82 Perangkat Daerah | 152 Perangkat Daerah | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | a |
| 6 | 01 | 03 | 2 | 02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 165 Perangkat Daerah | 165 Perangkat Daerah | a |

Tabel 3.2 merupakan tabel rencana kerja hasil input dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan hanya mencantumkan capaian program, hasil/sasaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan, sedangkan Sasaran Program, Keluaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN, DAN SASARAN SUB KEGIATAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN |
|----|---|---|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten |
| i | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| ii | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|---|
| 9 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| iii | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah |
| 12 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| 13 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| iv | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 14 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| 15 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 16 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan |
| 17 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| v | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 18 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 20 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga |
| 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
| 22 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|---|
| 23 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 24 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material |
| 25 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| 26 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 27 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| 28 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| vi | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan |
| 29 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 30 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| vii | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 31 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 32 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 33 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| viii | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara |
| 34 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 35 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 36 | Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel |
| 37 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN |
|-----|---|---|
| 38 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 39 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan |
| i | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Tersusunnya laporan, kesepakatan, dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal |
| 40 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
| 41 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 42 | Reviu Laporan Kinerja | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja |
| 43 | Reviu Laporan Keuangan | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan |
| 44 | Pengawasan Desa | Terlaksananya Pengawasan Desa |
| 45 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Terlaksananya Pengawasan Internal yang Terbentuk |
| 46 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
| ii | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu |
| 47 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani |
| 48 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi |
| i | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan |
| 49 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan |
| 50 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan |

7

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN |
|-----------|---|---|
| ii | Pendampingan dan Asistensi | Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi dan jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi |
| 51 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
| 52 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| 53 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
| 54 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |

Unit Organisasi : 6.01.00.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.00.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------------|--|--|---|--|--|--|------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | | | Program | Target Capaian Kinerja | | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 | | | | | | | | | | | | | | | 15,598,919,946 | 15,174,356,324 | 16,799,902,525 |
| 6 01 01 | | | | | | | | | | | | | | | 11,770,596,446 | 11,991,228,524 | 12,589,246,670 |
| 6 01 01 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | 95,129,600 | 50,753,800 | 104,642,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2.0 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | 45,170,600 | 21,352,300 | 49,687,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2.0 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | 13,706,200 | 1,696,000 | 15,076,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2.0 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | 2,566,000 | 2,466,600 | 2,822,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2.0 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | 3,993,800 | 2,625,200 | 4,393,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2.0 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | 2,991,000 | 2,684,300 | 3,290,100 |

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|--------------------|---|---|--|--|---------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|--|--------------------|---|-------|---|-----------------------------------|--|--|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 1 | 2.0 06 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 16 Laporan | 16 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 3,985,000 | 6,182,600 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 4,383,500 | | | |
| 6 01 01 1 | 2.0 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 7 Laporan | 2 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 22,717,000 | 13,746,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 24,988,700 | | | |
| 6 01 01 2 | 2.0 03 Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 64 Orang/bulan | 68 Orang/bulan | 100 % | 100 % | 8,738,221,696 | 9,396,010,074 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 8,953,267,675 | | | |
| 6 01 01 2 | 2.0 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Administrasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 100 % | 7,194,400 | 7,265,300 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 7,913,840 | | | |
| 6 01 01 2 | 2.0 05 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 % | 100 % | 4,027,900 | 4,057,200 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 4,430,690 | | | |
| 6 01 01 2 | 2.0 07 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD | Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 26 Laporan | 26 Laporan | 100 % | 100 % | 3,464,000 | 3,464,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 3,810,400 | | | |

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.00.00.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.00.00.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|----|--|-------------------|--------------------------|---|--|--|--|---------|---------|----------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--------|---------------|
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | Target | |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 5,489,330 |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 2,528,200 | 2,550,700 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 2,781,020 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Laporan | 100 % | 100 % | 2,462,100 | 3,083,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 2,708,310 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 05 | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 1,577,805,790 |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlayannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 132,378,400 | 119,469,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 145,616,240 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Terlayannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 64 Orang | 100 % | 100 % | 1,272,916,600 | 1,134,692,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 1,400,208,260 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlayannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 68 Orang | 100 % | 100 % | 11,029,400 | 16,601,600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 12,132,340 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlayannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 64 Orang | 100 % | 100 % | 18,044,500 | 17,159,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 19,848,950 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | 396,394,020 |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|--------------------|----|--|-------------------|--------------------------|----------------|--|---|---|---|---|----------------|-------------|------------------------|-----------|---|------------|--------------------|---|-------|------------|
| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | | | Sesudah | | Sebelum | | Sesudah | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 01 | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 14.720,100 | 14.720,100 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 16.192,110 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 02 | 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | 3.294,400 | 2.134,800 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 3.623,840 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 03 | 6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | 18.499,600 | 11.853,000 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 20.349,560 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 04 | 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Paket | 12 Paket | 100 % | 67.914,000 | 67.914,000 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 74.705,400 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 05 | 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Paket | 12 Paket | 100 % | 56.660,000 | 37.070,000 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 62.326,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 2.796,000 | 2.796,000 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 3.075,600 |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 07 | 6 | Penyediaan Bahan/Material | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | 19.880,000 | 20.087,900 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 21.868,000 |

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|--------------------|----|--|-----|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|--|
| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | | Hasil Kegiatan | | | Sumber Dana | | |
| | | | | | | | | Sebelum | | Sesudah | | Sebelum | | Sesudah | | | Sebelum | | | | Sesudah | |
| | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.0 | 08 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|---|------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur |
| 6 01 01 8 | 2.0 01 8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 3 Laporan | 650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 715.000 | |
| 6 01 01 8 | 2.0 02 8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 3 Laporan | 105.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 115.500.000 | |
| 6 01 01 8 | 2.0 04 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 Laporan | 3 Laporan | 60.896.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 66.986.040 | |
| 6 01 01 9 | 2.0 01 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 6 Jenis | 10.429.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 11.471.900 | |
| 6 01 01 9 | 2.0 02 9 Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 10 Unit | 6 Jenis | 73.522.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 80.874.200 | |
| 6 01 01 9 | 2.0 05 9 Pemeliharaan Mebel | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 200 Unit | 6 Jenis | 20.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 100 % | 22.220.000 | |
| | | | | | | | | | | 571.450.250 | 518.140.250 | | 928.962.045 | | | |

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------------------------|---|---|--|---|---|----------|-----------------------|------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|---|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 01 2 0 06 01 01 9 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pelaksanaan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 117 Unit | 83 Unit | 6 Jenis | 5 Jenis | 54,118,000 | 67,820,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 374,968,770 | | | | |
| 6 01 01 2 0 09 01 01 9 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pelaksanaan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 6 Jenis | 5 Jenis | 377,495,250 | 377,495,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 415,244,775 | | | | |
| 6 01 01 2 0 10 01 01 9 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pelaksanaan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 22 Unit | 27 Unit | 6 Jenis | 5 Jenis | 23,434,000 | 21,984,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 24,182,400 | | | | |
| 6 01 02 2 0 01 02 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 02 2 0 01 02 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 01 02 2 0 01 02 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 85 Laporan | 162 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 227,720,500 | 323,571,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100,00 % | 355,928,100 | | | | |
| 6 01 02 2 0 02 02 1 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 91 Laporan | 115 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 140,543,600 | 203,741,300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100,00 % | 224,115,430 | | | | |
| 6 01 02 2 0 03 03 1 | Reviu Laporan Kinerja | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 2 Laporan | 2 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 34,894,000 | 37,561,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100,00 % | 41,317,540 | | | | |
| 6 01 02 2 0 04 04 1 | Reviu Laporan Keuangan | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 30 Laporan | 32 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100,982,300 | 124,187,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100,00 % | 136,606,140 | | | | |

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|--------------------|---|--|--|---|--|------------------------|----------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------|---|--|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 6 01 02 1 05 | Pengawasan Desa | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 36 Laporan | 87 Laporan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 199,404,400 | 278,566,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100,00 % | 219,344,840 | |
| 6 01 02 1 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Kesiapan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 2 Kesepakatan | 2 Kesepakatan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 53,846,900 | 35,893,300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100,00 % | 59,231,590 | |
| 6 01 02 1 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 811,310,000 | 646,636,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100,00 % | 892,441,000 | |
| 6 01 02 2 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | 328,717,400 | | | |
| 6 01 02 2 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 10 Laporan | 3 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 111,858,000 | 82,529,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100,00 % | 123,043,800 | |
| 6 01 02 2 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 24 Laporan | 94 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 186,976,000 | 272,701,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100,00 % | 205,673,600 | |
| 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | | | | | | | | 1,362,661,500 | 1,952,953,815 | | |
| 6 01 03 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | 109,792,400 | 163,561,375 | | |
| 6 01 03 1 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis yang Disusun | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 3 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 103,741,000 | 66,409,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | 100,00 % | 118,551,400 | |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

| Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--|----------|---|----------------|---------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Program | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | Sebelum | Sesudah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 1 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 2 Dokumen | 41,372,700 | 43,382,600 | | Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan | 100,00 % | 45,009,975 | | |
| 6 01 03 2 | 2.0 02 2 | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | 1,630,753,400 | 1,252,869,100 | | | | 1,789,392,440 | |
| 6 01 03 2 | 2.0 01 2 | Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 6 perangkat daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 39,084,000 | 13,907,000 | | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | 100,00 % | | 42,992,400 | |
| 6 01 03 2 | 2.0 02 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 88 perangkat daerah | 152 perangkat daerah | 4 Laporan | 410,999,300 | 247,214,400 | | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | 100,00 % | | 452,099,230 | |
| 6 01 03 2 | 2.0 03 2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 4 Laporan | 888,065,400 | 809,894,300 | | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | 100,00 % | | 976,871,940 | |
| 6 01 03 2 | 2.0 04 2 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 % | 100,00 % | 165 perangkat daerah | 165 perangkat daerah | 4 Laporan | 292,604,700 | 181,853,400 | | Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi | 100,00 % | | 317,428,870 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 15,598,919,946 | 15,174,356,324 | | | | 16,799,902,525 | |

BAB IV.

P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai penyempurnaan Renja yang telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang belum terencana sebelumnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo. Perubahan Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Catatan Penting.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yaitu :

1. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun pada awal tahun belum dapat maksimal dikarenakan adanya penugasan-penugasan mandatori prioritas yang harus dilaksanakan.
2. Adanya penyesuaian desain aktifitas kegiatan yang harus menyesuaikan pedoman pelaksanaan yang baru.
3. Penyesuaian pagu program dan kegiatan akibat adanya perubahan-perubahan tersebut diatas dilakukan dengan rekomposisi dan efisiensi pagu anggaran tahun berjalan.

4.2. Kaidah-Kaidah

Kaidah-kaidah dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Memperhatikan Evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun berjalan.
2. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan belum terakomodir dalam Renja Tahun 2023.
3. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Isu-isu strategis yang telah ditetapkan.
5. Proses penyusunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023 antara lain :

1. Mengoptimalkan sarana, sumber daya dan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023 akan dijadikan acuan dalam rangka penyusunan anggaran sehingga kebutuhan-kebutuhan yang belum terakomodir dapat terdani. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis.

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN